

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada era kemerdekaan Indonesia keuangan negara di Indonesia masih dikelola dengan aturan yang diterbitkan oleh Belanda. Dalam perjalanannya sudah terjadi beberapa aturan meskipun saat itu belum ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tetapi pengelolaan keuangan negara Indonesia tetap dilakukan pencatatan, saat pertama kali pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan metode pencatatan tunggal (*single entry*). Meskipun belum resmi dikatakan sebagai SAP, Indonesia sudah memiliki standar akuntansi pemerintah sejak dulu, namun sistem akuntansi tersebut masih dikatakan sebagai sistem akuntansi tradisional yang pencatatan keuangannya hanya menghasilkan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja sehingga jika ada nilai sisa dapat dikatakan surplus atau defisit.

Saat itu negara Indonesia tidak pernah mengalami surplus maupun defisit karena pemerintah masih menganut sistem anggaran berimbang. Sistem anggaran berimbang adalah jumlah antara pendapatan dan pengeluaran sama besarnya. Dalam kebijakan anggaran berimbang pemerintah akan menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan agar tetap seimbang. Reformasi pada tahun 1998 mempengaruhi semuanya seperti perubahan anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja, perubahan SAP yang selama ini sistem pencatatannya menggunakan metode pencatatan tunggal (*single entry*) diubah menjadi sistem pencatatan ganda (*double entry*), dan pencatatan basis kas harus diubah menjadi basis akrual. Dalam perjalanan panjang pemerintah menerbitkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menerapkan aturan sistem kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*) kemudian diganti menjadi PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengubah basis akuntansi pemerintah dari kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

Sejak terbitnya PP 71 Tahun 2005 sampai 2015 merupakan masa perubahan penerapan basis akuntansi menuju akrual penuh. Pada tahun 2014 pencatatan laporan keuangan di Dinas masih dengan cara manual, hingga pada saat tahun 2015 Dinas Koperasi dan UKM menerapkan basis akrual pada pencatatan keuangannya melalui Sistem Administrasi Pemerintah menggunakan sistem SIMDA (Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah) saat itu Dinas masih dalam tahap penerapan basis kas menuju akrual, tahun 2017 Dinas sudah menerapkan basis akrual penuh pada pencatatan laporan keuangannya menggunakan SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan). Pemerintah Pusat maupun Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang menerapkan basis akrual penuh pada laporan keuangannya secara terkomputerisasi dengan mengikuti SAP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan akuntansi basis akrual menjadi salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan pemerintah modern. Informasi yang disediakan bersifat relevan dengan transaksi yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan uraian diatas, penulis membuat judul tugas akhir “Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana tahapan dalam penerapan akuntansi akrual di Dinas Koperasi dan UKM?
- b. Laporan keuangan dan dokumen apa saja yang dihasilkan dalam akuntansi akrual di Dinas Koperasi dan UKM?
- c. Strategi apa saja yang dilakukan serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan akrual basis?
- d. Sistem apa yang digunakan dan dampak yang dihasilkan dalam penerapan basis akrual penuh?

## 1.3 Tujuan

- a. Mengidentifikasi tahapan dalam penerapan akuntansi akrual di Dinas Koperasi dan UKM.
- b. Memberikan informasi laporan keuangan dan dokumen yang dihasilkan dalam akuntansi akrual di Dinas Koperasi dan UKM.
- c. Mengidentifikasi strategi yang dilakukan serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan akrual basis.
- d. Memberikan informasi sistem yang digunakan dan dampak yang dihasilkan dalam penerapan basis akrual penuh.



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies

## 1.4 Manfaat

1. Untuk Instansi  
Sebagai bahan acuan dan evaluasi dalam penerapan basis akrual.
2. Untuk Pembaca  
Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan.
3. Untuk Penulis  
Menambah wawasan dalam penggunaan basis akrual penuh didalam laporan keuangan serta sebagai syarat memperoleh gelar Ahli Madya.